



**S A L I N A N**

**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 188.45/ 920 - KUM/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN  
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)  
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**BUPATI TANAH LAUT,**

**Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 19, Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Kepala Daerah menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Bupati Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam lajur 3 (tiga) ditunjuk dan ditetapkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
1. Tugas dan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran:
    - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

- b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. menandatangani Surat Perintah Membayar - Langsung dan Surat Perintah Membayar - Tambah Uang;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- g. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran;
- h. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran; dan
- i. Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

2. Tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran:

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambah Uang dan Surat Permintaan Pembayaran-Langsung;
- b. menerima dan menyimpan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) dan Tambah Uang (TU);
- c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
- d. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- f. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik; dan
- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEEMPAT** : Dalam hal pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, maka ditunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melaksanakan sebagian tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.



- KELIMA : Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
  - menerima dan menyimpan pelimpahan Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran;
  - menerima dan menyimpan Tambah Uang (TU) dari Bendahara Umum Daerah;
  - melaksanakan pembayaran atas pelimpahan Uang Persediaan (UP) dan Tambah Uang (TU) yang dikelolanya;
  - menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
  - memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini efektif berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

ALFIRIAL. S.H. M.H.  
NIP.19750203 199903 2 005

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Tembusan :

- Gubernur Kalimantan Selatan.
- Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut.
- Inspektur Kabupaten Tanah Laut.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT  
 NOMOR : 188.45/ 920 - KUM/2020  
 TANGGAL : 30 Desember 2020

DAFTAR KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN,  
 DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
 PADA SKPD DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
 TAHUN ANGGARAN 2021

No.	SATUAN KERJA PERANGKAT BDAERAH (SKPD)	Kuasa Pengguna Anggaran,Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembant	
		Nama/NIP.	Jabatan
1	2	3	5
1	Sekretariat Daerah	Juliati Evi Rastini, S.Sos NIP. 19660408 198602 2 003	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Tata Usaha dan Keuangan
		Ina Gantiani, S.IP NIP. 19711122 199103 2 004	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Perekonomin dan Pembangunan
		H. Mukhtarraden, S.Sos, M.Si NIP. 19630412 198503 1 019	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Andi Mashabi, AP NIP. 19760623 199511 1 001	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Organisasi
		Alfirial, SH, MH NIP. 19750203 199903 2 008	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Hukum
		Muhammad Syahid, S.STP, M.AP NIP. 19790629 200003 1 004	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Tata Pemerintahan
		Mina Ayu Roswyda, ST NIP. 19800805 200501 2 014	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		Irma Rosanti, S.Sos, M.I.Kom NIP. 19730225 200604 2 006	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
		Latip Kamarudin, S.AP NIP. 19740705 199403 1 004	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian
		Muhammad Rusdy NIP. 19681118 200604 1 009	Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah
		Hani NIP. 19790511 200701 2 010	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum
		Risa Dinarjat, A.Md NIP. 19750831 200701 2 010	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Ekonomi dan Pembangunan
		Lisa Ayu Nurdiana, A.Md, Pjk NIP. 19860301 201001 2 001	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		Aditya Rachman, S.IP NIP. 19940823 201903 1 004	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Organisasi
		Samlan NIP. 19700802 200003 1 004	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Hubungan Masyarakat dan
		Muhammad Suryanoor, SH NIP. 19931219 201903 1 006	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Hukum
		Hamisah NIP. 19860113 200501 2 001	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Husaini NIP. 19810201 201001 1 001	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Tata Pemerintahan
2	Sekretariat DPRD	Yostia Febrian, A.Md NIP. 19840226 201001 1 008	Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPR
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rudy Wijayanto, A.Md NIP. 19880804 201502 1 002	Bendahara Pengeluaran
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Suhelpi, S.Kom NIP. 19800412 200903 2 003	Bendahara Pengeluaran
		Ahmani, S.Pi NIP. 19690806 199303 1 013	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pengembangan Usaha Perikanan
		Noor Irwandy Kodratillah, S.Pi NIP. 19770906 200604 1 016	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Perikanan Tangkap

1	2	3	5
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Ir. H. Akhmad Farhan NIP. 19630405 199203 1 013	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
		Hj. Eko Subiyanti, SKM NIP. 19650812 198903 2 013	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
		Kelik Susilawati H. SP NIP. 19800929 200604 2 032	Bendahara Pengeluaran
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Drs. Sugeng, M.Pd NIP. 19631210 199802 1 001	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembinaan Ketenagaan
		Mirza Fazrina, ST NIP. 19800322 200604 2 012	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pendidikan Dasar
		Amperansyah, SKM, MS NIP. 19660430 199012 1 001	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Kebudayaan
		Hj. Henny Hastuty, S.Sos NIP. 19700826 200604 2 005	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal
		Siti Wahidah NIP. 19850811 201406 2 003	Bendahara Pengeluaran
7	Dinas Perhubungan	H. Dwiyono, S.Sos, MM NIP. 19641125 197803 1 009	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Perhubungan Darat
		Danoe Sulaiman, SH NIP. 19801125 200212 1 003	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan
		Nurul Sofia Budi NIP. 19770731 200701 2 009	Bendahara Pengeluaran
8	Badan Pendapatan Daerah	Drs. H. Muhammad Badarudin NIP. 19721106 199101 1 001	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang PBB dan BPHTB
		Akhmad Rijai, S.Sos NIP. 19630428 198703 1 008	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pajak Daerah
		Indra Wardhana, S.STP NIP. 19831106 200212 1 001	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retribusi Daerah dan Pelaporan
		Sri Rejeki, A.Md, Pjk NIP. 19800403 200701 2 010	Bendahara Pengeluaran
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Siti Ramlah, A.Md NIP. 19790204 200801 2 019	Bendahara Pengeluaran
10	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Reni Angraini, A.Md NIP. 19840613 201001 2 016	Bendahara Pengeluaran
11	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Diansyah, ST NIP. 19770404 200903 1 009	Kuasa Pengguna Anggaran
		Gusti Dwi Erzandi Kusuma, ST NIP. 19790709 200701 1 022	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Tata Kota dan Kebersihan
		Lia Mardiana NIP. 19840319 200901 2 001	Bendahara Pengeluaran
12	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Pekebunan	Ir. Basri NIP. 19640325 199203 1 009	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Tanaman Pangan
		Al Jamaluddin Malik, A.Pi NIP. 19670804 199103 1 010	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Hortikultura
		Edy Haryadi, SP NIP. 19800512 200903 1 006	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Perkebunan
		Rozani Fitri, SP NIP. 19731111 200604 1 014	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Penyuluhan dan Prasarana Pertanian
		Imam Syahrizal, A.Md NIP. 19900828 201402 1 003	Bendahara Pengeluaran
		Gusti Noviar Kusuma, ST NIP. 19861115 201001 1 006	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi
		Ulil Amri Bahtiar, S.Pd, M.Si	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Tata



1	2	3	5
13	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	NIP. 19791213 200604 1 011	Ruang
		Anang Ifansyah, ST NIP. 19730217 200801 1 009	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pertanahan
		Paimun, ST NIP. 19690512 200701 1 032	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sumber Daya Air
		Dwi Hadi Putra, ST NIP. 19740517 200604 1 002	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina
		Dody Tri Hartanto, A.Md NIP. 19790126 201001 1 012	Bendahara Pengeluaran
14	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rini Ramadiyah, A.Md NIP. 19920321 201502 2 004	Bendahara Pengeluaran
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Irma Damayanti, A.Md NIP. 19931015 201502 2 001	Bendahara Pengeluaran
16	Dinas Pariwisata	Refma Norawiyati NIP. 19840914 200501 2005	Bendahara Pengeluaran
17	Dinas Koperasi Usaha kecil dan Perdagangan	Agustini, A.Md, Pjk NIP. 19810823 200701 2 007	Bendahara Pengeluaran
18	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan	Ellya Wahyu, S.Pd NIP. 19770210 200903 2 005	Bendahara Pengeluaran
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Diana, A.Md, Pjk NIP. 19811125 200604 2 032	Bendahara Pengeluaran
20	Inspektorat	Boro Wahyono, SE NIP. 19730219 201001 1 001	Bendahara Pengeluaran
21	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dan Pemadam Kebakaran	Sukaji NIP. 19720713 200604 1 018	Bendahara Pengeluaran
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Helmy Yunizar Mahdi, A.Md NIP. 19931003 201903 1 004	Bendahara Pengeluaran
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kesria Nurilam Putri D. S, Amd. Pjk NIP. 19920227 201101 2 011	Bendahara Pengeluaran
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	Alamsyah, SE NIP. 19690105 199303 1 011	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Akuntansi
		Tedy Mulyana, ST, MT NIP. 19800617 200501 1 007	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset
		John Anis, S.ST NIP. 19690814 198903 1 004	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Penatausahaan Aset
		Agung Ayu Kusuma Wardhani, A.Md NIP. 19820928 200604 2 021	Bendahara Pengeluaran SKPD
		M. Yuliansyah, SKM NIP. 19760912 200501 1011	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Kesehatan Masyarakat
		H. Risfani, SKM NIP. 19630202 198712 1 003	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pelayanan Kesehatan
		Antonius Jaka RSH, M.Kes NIP. 19661206 199302 1 002	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
		H. Hasan, SKM NIP. 19710515 199703 1 013	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sumber Daya Kesehatan
		dr. Hj. Isna Farida NIP. 19740612 200501 2 016	Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat dan Pelayanan RSUD H. Boedjasin Pelaihari
		dr. R.M. Nur Haryono Novianto NIP. 19781108 200903 1 003	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pelayanan RSUD H. Boedjasin Pelaihari
		H. Syafangat, SKM NIP. 19690101 199101 1 003	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Keperawatan RSUD H. Boedjasin Pelaihari

1	2	3	5
25	Dinas Kesehatan	Mahyuni Hidayat, SE NIP. 19780606 200801 1 026	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Penunjang RSUD H. Boedjasin Pelaihari
		dr. Endik Arifianto NIP. 19820321 201001 1 002	Kuasa Pengguna Anggaran RSUD KH. Mansyur, Kintap
		H. R. Dody Iskandar, SKM NIP. 19810919 200604 1 017	Kuasa Pengguna Anggaran UPT. Instalasi Farmasi Kesehatan
		Mira Susanti NIP. 19820507 200312 2 003	Kuasa Pengguna Anggaran UPT. Laboratorium Kesehatan
		Khadavi Muttaqien NIP. 19830523 201001 1 026	Bendahara Pengeluaran
		Yudi Firmansyah NIP. 19810501 200801 1 016	Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari
		Janainah, A.Md. Keb NIP. 19790923 200701 2 010	Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Rumah Sakit KH. Mansyur Kintap
		Sapriani NIP. 19780510 200701 1 009	Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD. H. Boedjasin Pelaihari
		Eka Maulida Novarianti, AMG NIP. 19851114 201001 2 019	Bendahara Pengeluaran BLUD Rumah Sakit KH. Mansyur Kintap
26	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ida Sri Lestari, A.Md NIP. 19790807 201001 2 008	Bendahara Pengeluaran
27	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Bintarti, SE NIP. 19730415 200701 2 024	Bendahara Pengeluaran
28	Dinas Sosial	Hendra, S. AP NIP. 19791205 200901 1 003	Bendahara Pengeluaran
29	Kantor Kecamatan Pelaihari	Raisa Dewina, S.IP NIP. 19930814 201507 2 001	Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Kelurahan Angsau
		Auranti Muraya Purihaningrum, S.STP NIP. 19860502 200412 2 001	Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Kelurahan Karang Taruna
		M. Hidayatullah, S.STP NIP. 19931211 201507 1 001	Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Kelurahan Pelaihari
		Henny Fitrianie, S.Sos NIP. 19780905 200801 2 030	Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Kelurahan Pabahanan
		H. Iberahim, SST NIP. 19690703 199103 1 005	Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Kelurahan Sarang Halang
		Aris Utomo, A.Md.Pjk NIP. 19810419 200604 1 008	Bendahara Pengeluaran
30	Kantor Kecamatan Jorong	Yuli Rahmawati, A.Md NIP. 19750713 201001 2 008	Bendahara Pengeluaran
31	Kantor Kecamatan Batu Ampar	Muhammad Farhan NIP. 19800810 201406 1 002	Bendahara Pengeluaran
32	Kantor Kecamatan Kurau	Darmasiah NIP. 19750419 200701 2 013	Bendahara Pengeluaran
33	Kantor Kecamatan Tambang Ulang	Yetti Yuniati NIP. 19730622 199403 2 003	Bendahara Pengeluaran
34	Kantor Kecamatan Bati- Bati	Sylka Fahrina, A.Md NIP. 19911213 201502 2 003	Bendahara Pengeluaran
35	Kantor Kecamatan Takisung	Suryani NIP. 19680510 199002 1 003	Bendahara Pengeluaran
36	Kantor Kecamatan Panyipatan	Fahmie Risdani NIP. 19841206 200501 1 005	Bendahara Pengeluaran



1	2	3	5
37	Kantor Kecamatan Bajuin	Lidia Miranti Mayasari, SE NIP. 19840817 200903 2 022	Bendahara Pengeluaran
38	Kantor Kecamatan Bumi Makmur	Tukiyah, A.Md NIP. 19790619 201001 2 005	Bendahara Pengeluaran
39	Kantor Kecamatan Kintap	Jumani NIP. 19770513 200906 1 001	Bendahara Pengeluaran
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Teguh Heriyadi NIP. 19790205 200701 1 012	Bendahara Pengeluaran

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

*alfirial*

ALFIRIAL, SH, MH  
NIP.19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. SUKAMTA